



Politik Anti Neoliberalisme Venezuela di Era Kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro

Nur Aisyah Yusran

Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nuraisyahyusran26@gmail.com

Abstract. *This study examines how Nicolás Maduro's anti-neoliberal politics in Venezuela triggered a systematic securitization process by the US from 2014 to 2026. Drawing on Securitization Theory (Buzan et al., 1998) and a Neo-Gramscian perspective (Cox, 1981), this study argues that Maduro's anti-neoliberal policies constitute a counter-hegemonic challenge created by the United States. This threat is framed as a threat to democracy, regional security, and ultimately the narco-state, ultimately leading to the military intervention of January 2026. Economic sanctions failed to pressure the regime, exacerbated the humanitarian crisis, and set a dangerous precedent for the norm of state sovereignty in international law, suggesting that this securitization process proved ineffective. By addressing temporal and conceptual gaps in previous research, this study adds to the Security Studies literature. This study also highlights implications for international law, regional stability in Latin America, and the broader debate on securitization practices in contemporary global politics and US foreign policy strategy and international security governance frameworks debates.*

Keywords: *Anti-Neoliberalism; Neo-Gramscian; Nicolás Maduro; Securitization Theory; US Military Intervention.*

Abstrak. Studi ini meneliti bagaimana politik anti-neoliberal Nicolás Maduro di Venezuela memicu proses sekuritisasi sistematis oleh AS dari tahun 2014 hingga 2026. Dengan mengacu pada Teori Sekuritisasi (Buzan dkk., 1998) dan perspektif Neo-Gramscian (Cox, 1981), studi ini berpendapat bahwa kebijakan anti-neoliberal Maduro merupakan tantangan kontra-hegemoni yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ancaman ini dibingkai sebagai ancaman terhadap demokrasi, keamanan regional, dan pada akhirnya negara narkoba, yang akhirnya menyebabkan intervensi militer pada Januari 2026. Sanksi ekonomi gagal menekan rezim, memperburuk krisis kemanusiaan, dan menetapkan preseden berbahaya bagi norma kedaulatan negara dalam hukum internasional, menunjukkan bahwa proses sekuritisasi ini terbukti tidak efektif. Dengan mengatasi kesenjangan temporal dan konseptual dalam penelitian sebelumnya, studi ini menambah literatur Studi Keamanan. Studi ini juga menyoroti implikasi bagi hukum internasional, stabilitas regional di Amerika Latin, dan debat yang lebih luas tentang praktik sekuritisasi dalam politik global kontemporer serta strategi kebijakan luar negeri AS dan kerangka kerja tata kelola keamanan internasional.

Kata kunci: Anti-Neoliberalisme; Intervensi Militer AS; Neo-Gramscian; Nicolás Maduro; Teori Sekuritisasi.

1. LATAR BELAKANG

Sejak berakhirnya perang dingin, neoliberalisme telah mendominasi sistem internasional, menciptakan struktur ekonomi global yang menguntungkan negara-negara industri. Negara-negara berkembang telah secara sistematis didorong untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang melayani kepentingan modal global melalui organisasi seperti World Bank dan IMF (Stiglitz, 2002). Sebagai salah satu dari sedikit negara yang dengan teguh menentang kecenderungan ini dan mempertahankan orientasi ekonomi anti-neoliberal di tengah meningkatnya tekanan internasional, Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro menjadi kasus yang sangat menarik untuk diteliti dalam konteks ini.

Dengan cadangan minyak lebih dari 303 miliar barel, atau hampir seperempat dari total cadangan minyak dunia, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia (OPEC,

2022). Selain menjadi landasan bagi program-program sosial Bolivarian yang dimulai oleh Hugo Chavez pada tahun 1999 dan dijalankan oleh Maduro sejak 2013, kekayaan ini telah menimbulkan ketegangan strategis dengan Amerika Serikat, yang memandang kontrol negara atas sektor energi Venezuela sebagai penghalang bagi kepentingan ekonominya (Corrales, 2020). Setelah anjloknya harga minyak global pada tahun 2014, yang memicu krisis ekonomi berkepanjangan, situasi menjadi semakin rumit. Tingkat inflasi mencapai 269% pada tahun 2025 (IMF, 2025), dan lebih dari 7,9 juta warga Venezuela terpaksa mengungsi (UNHCR, 2025). Selain itu, sanksi ekonomi AS, yang telah diberlakukan secara bertahap sejak 2015, terbukti memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat (Weisbrot & Sachs, 2019).

Peristiwa terkini menunjukkan bahwa krisis di Venezuela telah memasuki tahap yang lebih tak terduga. Menyusul laporan mengenai kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum Venezuela tahun 2024 yang disampaikan oleh komunitas internasional, terutama Freedom House (2024), legitimasi pemerintahan Maduro semakin dipertanyakan. Pada saat yang sama, aset minyak Venezuela di pasar luar negeri masih disita, sehingga sangat membatasi fleksibilitas ekonomi negara tersebut karena telah lama berada di bawah sanksi (Brookings, 2026). Laporan mengenai perubahan struktur kekuasaan di Caracas dan pembentukan pemerintahan transisi di bawah Delcy Rodriguez pada awal 2026 menandai dimulainya fase baru yang masih berkembang dan belum dibahas secara mendalam dalam literatur ilmiah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah Venezuela dari berbagai sudut pandang. Dengan menggunakan Teori Pengambilan Keputusan, Kunkunrat et al., (2021) menelaah kelemahan-kelemahan program Maduro dan menyimpulkan bahwa pengambilan kebijakan yang didasarkan pada warisan partai merupakan sumber utama masalah internal Venezuela. Sementara Maulidya (2022) menggunakan kerangka Kantian Triangle untuk menganalisis risiko terhadap perdamaian di Venezuela, Budisatria et al., (2022) menggunakan pendekatan Realistis untuk menganalisis hiperinflasi di Venezuela dalam kaitannya dengan postur strategis AS. Kepentingan minyak menjadi pendorong utama keterlibatan AS dalam krisis Venezuela, menurut Ivon Christiana et al., (2022). Namun, studi-studi ini memiliki dua kelemahan umum, pertama, tidak ada yang secara khusus mengkaji hubungan antara proses sekuritisasi AS sebagai sarana untuk melegitimasi tekanan dan perlawanan anti-neoliberal Venezuela. Kedua, sebagian besar ditulis sebelum eskalasi dramatis pada 2024-2026, sehingga tidak mencakup perkembangan terbaru, yang telah menjadi puncak dari seluruh dinamika yang sedang berlangsung.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memberikan dua kontribusi orisinal. Secara konseptual, penelitian ini menggabungkan perspektif Neo-Gramscian (Cox, 1981) dengan Teori Sekuritisasi (Buzan et al., 1998) untuk menjelaskan bagaimana kebijakan anti-neoliberal Maduro sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni global menyebabkan Amerika Serikat membangun narasi ancaman, yang kemudian menjadi dasar pembenaran bagi eskalasi tekanan internasional. Analisis ini melengkapi penelitian sebelumnya yang berakhir pada fase sanksi ekonomi dengan mencakup periode hingga tahun 2026. Ada tiga hal yang akan dibahas dalam bagian pembahasan studi ini meliputi (1) bentuk-bentuk konkret dari kebijakan anti-neoliberal Maduro dan landasan ideologisnya, (2) bagaimana Amerika Serikat menggambarkan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai ancaman melalui proses sekuritisasi, dan (3) implikasi dari proses sekuritisasi ini terhadap meningkatnya tekanan internasional dan situasi Venezuela secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tujuan kajian teoritis penelitian ini adalah untuk menawarkan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara politik anti-neoliberal Venezuela dan dinamika kekuatan yang dihadapinya. Teori Sekuritisasi dalam studi keamanan dan Neo-Gramscian dalam ekonomi politik internasional adalah dua metode utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua metode ini dipilih karena dapat menjelaskan fenomena Venezuela dari sudut pandang ideologis dan diskursif dalam sistem dunia, di samping sudut pandang material.

Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde akan digunakan dalam penelitian ini. Menurut teori ini, suatu isu dapat menjadi isu keamanan bukan hanya karena bersifat objektif, tetapi juga karena beberapa aktor menggunakan wacana untuk menciptakannya sebagai ancaman (Buzan et al., 1998). Amerika Serikat khususnya sering menggambarkan kebijakan anti-neoliberal dan sikap politik Venezuela sebagai ancaman terhadap kepentingan internasional, demokrasi, dan stabilitas regional. Melalui proses sekuritisasi ini, Venezuela dipandang bukan hanya sebagai negara yang sedang mengalami krisis internal, tetapi juga sebagai ancaman yang membutuhkan tindakan drastis seperti tekanan politik, sanksi ekonomi, dan isolasi diplomatik. Dengan demikian, teori sekuritisasi berkontribusi pada penjelasan bagaimana konstruksi narasi global, selain faktor material, menjadi dasar tekanan internasional terhadap Venezuela.

Namun teori sekuritisasi saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Venezuela, oleh karena itu teori neo-gramscian juga akan digunakan dalam penelitian ini. Teori

Neo-Gramscian memandang hubungan internasional sebagai platform bagi struktur kekuasaan global dan konflik ideologis di samping interaksi antar negara. Hegemoni global diciptakan oleh kombinasi kekuatan material, institusi, dan ideologi, menurut teori Antonio Gramsci yang kemudian disempurnakan oleh Robert W. Cox (Cox, 1981). Neoliberalisme dapat dilihat dari perspektif ini sebagai jenis hegemoni yang mengatur ekonomi dunia melalui organisasi internasional, prinsip pasar bebas, dan praktik kapitalis global. Dalam kerangka ini, negara-negara berkembang seperti Venezuela cenderung tunduk.

Salah satu cara untuk melihat langkah-langkah anti-neoliberal Venezuela di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro adalah sebagai semacam oposisi terhadap hegemoni ini. Upaya untuk memperkuat kemerdekaan ekonomi nasional dan menumbangkan struktur kekuasaan global yang mapan ditunjukkan dalam penolakan liberalisasi pasar dan supremasi modal global. Tindakan-tindakan ini memiliki komponen ekonomi dan ideologis dalam kerangka Neo-Gramscian karena bertujuan untuk mengubah norma dan nilai-nilai yang berlaku yang mengendalikan sistem internasional. Oleh karena itu, pertarungan antara hegemoni dan kontra-hegemoni dapat dianggap sebagai komponen dari konflik yang muncul antara Venezuela dan para pemain eksternal.

Studi ini secara implisit dimulai dengan premis bahwa kemungkinan suatu negara digambarkan sebagai ancaman dalam sistem internasional meningkat seiring dengan tingkat penentangannya terhadap hegemoni neoliberal. Dalam contoh Venezuela, metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika interaksi antara ideologi ekonomi, kekuatan global, dan keamanan internasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik anti-neoliberalisme di Venezuela pada era kepemimpinan Nicolás Maduro serta kaitannya dengan dinamika tekanan internasional yang muncul dalam sistem global. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis makna, ide, dan hubungan antar aktor yang terlibat dalam fenomena tersebut secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya bersifat sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku akademis, laporan organisasi internasional seperti UNHCR, IMF, dan Freedom House, dokumen kebijakan resmi, serta publikasi lembaga seperti CEPR dan Brookings Institution yang relevan dengan topik kajian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana (*discourse analysis*), yang dipilih karena selaras dengan kerangka teori sekuritisasi yang menjadi pisau analisis utama penelitian ini. Teori Sekuritisasi pada dasarnya menganalisis bagaimana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman melalui tindak tutur (*speech acts*) dan narasi yang dibangun oleh aktor-aktor berkuasa. Oleh karena itu, analisis wacana mengidentifikasi bagaimana Amerika Serikat secara sistematis membangun narasi ancaman terhadap Venezuela melalui pernyataan-pernyataan resmi, kebijakan, dan dokumen publik dalam rentang waktu 2014-2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Konkret Kebijakan Anti-Neoliberal Maduro dan Landasan Ideologinya

Warisan intelektual Bolivarianisme, yang dimulai oleh Hugo Chávez pada tahun 1999, tak terpisahkan dari kebijakan anti-neoliberal Nicolás Maduro di Venezuela. Kegagalan kebijakan neoliberal Structural Adjustment Program (SAP) IMF pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, yang memaksa Venezuela untuk menerapkan privatisasi, deregulasi, dan devaluasi mata uang, kebijakan yang justru memperparah ketimpangan dan memicu krisis sosial berkepanjangan secara langsung memicu munculnya Bolivarianisme (Budisatria et al., 2022). Bolivarianisme membangun narasi bahwa integrasi ke dalam sistem neoliberalisme global hanya akan memperpanjang ketergantungan Venezuela pada kekuatan-kekuatan kapitalis asing, berdasarkan tiga prinsip mendasar yaitu kedaulatan ekonomi nasional, nasionalisme sumber daya alam, dan anti-imperialisme (Cox, 1981). Menurut pandangan Neo-Gramscian, ideologi ini merupakan upaya kontra-hegemonik yang menentang tatanan global neoliberalisme yang telah ditetapkan oleh negara-negara industri maju sebagai standar.

Setelah wafatnya Chávez pada Maret 2013, Maduro mengambil alih kepemimpinan, membawa serta tidak hanya kewenangan politik tetapi juga seluruh ideologi Bolivarian dan janji untuk menjaganya. Maduro menepati janji ini meskipun jatuhnya harga minyak global pada 2014 mulai mengikis kondisi mendasar yang menopangnya, terutama pendapatan minyak yang tinggi. Sumber utama konflik dengan AS dan sistem ekonomi global adalah komitmen yang tak tergoyahkan ini untuk mempertahankan sikap anti-neoliberal selama krisis (Ivon Christiana et al., 2022).

Maduro menggunakan tiga instrumen utama untuk menerapkan agenda anti-neoliberalnya di dalam negeri. Pertama, pembelaan terhadap nasionalisasi PDVSA dan penolakan terhadap privatisasi industri energi. Karena minyak dipandang sebagai alat kedaulatan nasional, bukan sekadar komoditas ekonomi, pemerintahan Maduro bersikukuh mempertahankan kendali penuh negara atas sektor energi melalui PDVSA (Loppies et al.,

2020). Kedua, untuk mencegah penetrasi pasar bebas, Maduro menerapkan sistem kontrol harga dan nilai tukar mata uang yang ketat. Secara ideologis, sistem ini merupakan penolakan terhadap liberalisasi pasar yang memandang proses penetapan harga sebagai satu-satunya pengatur ekonomi, meskipun ada tuduhan bahwa hal tersebut menyebabkan kelangkaan dan hiperinflasi (Kunkunrat et al., 2021). Ketiga, Venezuela terus-menerus menolak bantuan dari World Bank dan IMF dalam mengatasi krisis ekonominya. Maduro mempertahankan sikap Chávez sejak Venezuela menarik diri dari IMF pada tahun 2007, dengan memandang tawaran bantuan dari kedua organisasi tersebut sebagai campur tangan politik negara-negara Barat yang menyamar sebagai keprihatinan ekonomi (Budisatria et al., 2022).

Maduro menerapkan dua strategi secara bersamaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya yang anti-neoliberal di kancah internasional. Sebagai alternatif dari sistem perbankan Barat, Venezuela pertama-tama menjalin aliansi strategis dengan Tiongkok, Iran, Kuba, dan Rusia. Dalam kerangka Neo-Gramscian, kolaborasi ini, yang mencakup investasi energi, perdagangan bilateral, dan dukungan politik di forum internasional, dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan jaringan kontra-hegemoni yang memberikan alternatif terhadap dominasi sistem neoliberal (Budisatria et al., 2022). Kedua, Maduro mempertahankan komitmen Venezuela terhadap PetroCaribe dan ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) sebagai arsitektur ekonomi regional yang didasarkan pada solidaritas, kesejahteraan sosial, dan anti-imperialisme sebuah model integrasi regional yang secara khusus diciptakan sebagai lawan dari model integrasi neoliberalisme yang didorong oleh Amerika Serikat melalui FTAA (Loppies et al., 2020).

Pemerintahan Maduro secara diam-diam telah menerapkan berbagai langkah yang bertentangan dengan ideologi yang dianutnya, terlepas dari retorika anti-neoliberalnya yang terus-menerus. Dengan mengizinkan transaksi dalam dolar AS di pasar domestik sejak 2018, Maduro secara efektif telah memfasilitasi dolarisasi ekonomi Venezuela. Menurut logika Bolivarian, keputusan ini seharusnya dipandang sebagai penyerahan diri terhadap imperialisme ekonomi AS (CSIS, 2025). Selain itu, sebagai reaksi praktis terhadap runtuhnya kapasitas produksi PDVSA, pemerintah telah memberlakukan liberalisasi terbatas di sektor minyak dengan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk beroperasi. Paradoks ini menyoroti aspek penting dari analisis Neo-Gramscian yaitu tergantung pada batasan struktural yang dihadapi, perlawanan terhadap hegemoni mungkin bersifat selektif dan pragmatis daripada konstan dan menyeluruh (Cox, 1981). Selain itu, AS menggunakan kontras antara retorika dan realitas ini untuk memperkuat narasi sekuritisasi mereka tentang Venezuela,

yang menyatakan bahwa kediktatoran Maduro bukan hanya ancaman bagi stabilitas regional tetapi juga tidak memiliki legitimasi ideologis yang sebenarnya.

Proses Sekuritisasi Amerika Serikat Terhadap Venezuela

Sebelum menganalisis proses sekuritisasi AS terhadap Venezuela, penting untuk menetapkan kerangka analitis yang digunakan. Dalam Securitization Theory, proses sekuritisasi melibatkan tiga komponen utama yaitu securitizing actor (aktor yang mengkonstruksi ancaman), referent object (objek yang diklaim terancam), dan audience (audiens yang harus menerima konstruksi ancaman tersebut sebagai sah) (Buzan et al., 1998). AS adalah aktor utama dalam proses sekuritisasi di Venezuela, dan seiring eskalasi kebijakan, objek referen secara bertahap berubah dari demokrasi regional menjadi keamanan regional hingga keamanan AS. Audiens target terdiri dari opini publik domestik AS, organisasi multilateral, dan komunitas internasional. Proses ini berlangsung dalam tiga tahap yang saling membangun satu sama lain selama lebih dari sepuluh tahun, bukan sekaligus.

Pembuatan narasi bahwa pemerintahan Maduro merupakan ancaman bagi demokrasi regional menandai awal dari sekuritisasi AS terhadap Venezuela. Dokumentasi sistematis mengenai penurunan demokrasi Venezuela di bawah Maduro menjadi dasar bagi cerita ini. Maduro secara bertahap mengubah warisan semi-otoriter rezim Chavez menjadi otoritarianisme penuh, melemahkan institusi negara, mengacaukan keseimbangan kekuasaan, memecah masyarakat, dan memperlakukan lawan politik sebagai "musuh bangsa," menurut analisis Oner (2021) dalam Seri Profil Pemimpin ECPS. Meskipun oposisi berhasil memenangkan 58% suara dalam pemilihan legislatif 2015 yang membuktikan melemahnya dukungan rakyat terhadap Maduro, ia justru merespons dengan serangkaian langkah yang secara sistematis melumpuhkan oposisi mulai dari pembatasan wewenang Majelis Nasional melalui Mahkamah Agung hingga pembentukan Majelis Konstituante sepihak pada 2017, yang oleh Salmerón & Salmerón (2019) disebut sebagai 'estocada final a la institucionalidad democrática' atau pukulan mematikan terhadap institusi demokrasi Venezuela.

Narasi tentang ancaman terhadap demokrasi kemudian dibangun dan diwujudkan melalui langkah-langkah pemerintah tertentu. Menurut Teori Sekuritisasi, momen sekuritisasi resmi pertama yang berkaitan dengan Venezuela terjadi ketika Presiden Obama menandatangani Executive Order 13692 pada Maret 2015, secara resmi menyatakan Venezuela sebagai "ancaman luar biasa terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat" (Flores Flores, 2025). Dalam penelitiannya tentang geopolitik demokratisasi Venezuela, Flores Flores (2025) menelaah bagaimana komentar-komentar Obama merupakan bagian dari strategi geoekonomi AS yang lebih luas untuk menghukum Venezuela dan

mengintegrasikannya kembali ke dalam sistem dominasi hegemonik, meniadakan tantangan sistemik-ideologis yang diajukan oleh Revolusi Bolivarian. Bersamaan dengan itu, AS mulai aktif mendukung Juan Guaido dan koalisi oposisi sebagai representasi 'demokrasi yang sah', sehingga memperkuat narasi bahwa Maduro adalah pemimpin ilegitim yang mengancam kehendak rakyat Venezuela.

Narasi sekuritisasi AS telah meluas untuk memasukkan ancaman terhadap keamanan kawasan Amerika Latin selain situasi kemanusiaan yang memburuk di Venezuela. Lebih dari 7,9 juta warga Venezuela bermigrasi dalam jumlah besar (UNHCR, 2025), yang digambarkan sebagai masalah keamanan regional yang memerlukan respons yang terkoordinasi, dengan AS memimpin upaya ini. Menurut perspektif ini, Venezuela kini dipandang sebagai sumber ketidakstabilan yang mengancam negara-negara di sekitarnya, bukan hanya sebagai negara yang gagal di dalam negeri.

Pada tahap ini, pemerintahan Trump mengeluarkan sejumlah Executive Order yang lebih luas yang memperkuat sanksi ekonomi. EO 13808 (Agustus 2017) membatasi transaksi pasar keuangan AS dengan bisnis pemerintah Venezuela. EO 13827 pemerintah Venezuela (Januari 2018) melarang setiap transaksi yang terkait dengan cryptocurrency. Sanksi diperluas ke industri minyak dan emas melalui EO 13850 (November 2018). Pada puncaknya tahun 2019, AS membekukan aset Venezuela senilai US\$5,5 miliar di lebih dari 50 lembaga keuangan internasional dan memberlakukan embargo minyak lengkap yang mencegah semua transaksi PDVSA dengan korporasi AS (Ivon Christiana et al., 2022). Studi oleh Flores Flores (2025) mengklaim bahwa sanksi-sanksi ini tidak efektif karena, daripada mendorong demokratisasi Venezuela, sanksi-sanksi tersebut justru memperburuk masalah ekonomi negara itu dan memperkuat otoritas Maduro, yang mungkin ia gunakan sebagai alasan untuk semakin memperkokoh kekuasaannya.

Selain sanksi bilateral, AS juga menggunakan OAS di bawah Sekretaris Jenderal Luis Almagro sebagai instrumen isolasi diplomatik regional yang mendorong pengakuan Guaido, mengecam pelanggaran HAM, dan akhirnya memaksa Venezuela keluar dari OAS pada April 2019 (Oner, 2021).

Tahap paling dramatis dan paling signifikan dalam proses sekuritisasi AS terhadap Venezuela adalah konstruksi narasi Venezuela sebagai narco-state, negara yang tidak hanya gagal secara demokratis dan mengancam stabilitas regional, tetapi secara aktif terlibat dalam kejahatan internasional yang mengancam keamanan nasional AS secara langsung. Fondasi narasi ini diletakkan pada 26 Maret 2020, ketika Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap Maduro atas tuduhan narco-terorisme dan konspirasi penyelundupan kokain.

Dakwaan yang dirilis di Southern District of New York menuduh Maduro memimpin *Cártel de Los Soles* dan bersekongkol dengan FARC untuk 'membangiri' Amerika Serikat dengan kokain sebagai 'senjata' melawan Amerika (U.S. Department of Justice, 2020). Dalam analisis Vanegas (2026), dakwaan ini merepresentasikan tahap krusial dalam transformasi framing Venezuela dari 'rezim otoriter' menjadi 'organisasi kriminal transnasional', sebuah pergeseran kategorisasi yang secara fundamental mengubah basis legitimasi untuk tindakan-tindakan luar biasa yang akan menyusul.

Kemudian, melalui serangkaian tindakan yang saling memperkuat, narasi negara narkoba ini dibangun secara kumulatif. Maduro secara simbolis disetarakan dengan buronan kriminal internasional tingkat atas ketika AS meningkatkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya menjadi US\$50 juta pada Agustus 2025 (Vanegas, 2026). Di bawah kedok memerangi perdagangan narkoba, Angkatan Laut AS memulai operasi di jalur air Karibia pada September 2025. Pada Desember tahun yang sama, sebuah kapal tanker minyak Venezuela disita. Penangkapan Presiden Maduro dan istrinya Cilia Flores oleh Pasukan Delta AS di Caracas pada 3 Januari 2026 menandai puncak dari seluruh rangkaian konstruksi naratif. Ahmed (2026) menggambarkan operasi ini sebagai contoh paling ekstrem dari penggunaan wacana sekuritisasi sebagai justifikasi untuk intervensi langsung dalam kedaulatan negara yang berdaulat.

Dari sudut pandang Teori Sekuritisasi, penting untuk mengamati bagaimana pembingkaihan terhadap narco-terorisme menawarkan keuntungan strategis yang tidak ditemukan dalam pembingkaihan demokratis sebelumnya. Dengan mengklasifikasikan Venezuela sebagai ancaman kriminal daripada ancaman ideologis atau politik, Amerika Serikat telah mampu mengatasi keterbatasan normatif kedaulatan yang sejauh ini membatasi kemampuannya untuk mengambil tindakan. Menurut Flores Flores (2025), alasan AS membuat konsep non-intervensi dan kekebalan kepala negara menjadi tidak berarti ketika sebuah pemerintah dibentuk bukan sebagai "pemerintah yang buruk" tetapi sebagai "organisasi kriminal yang menyamar sebagai pemerintah". Menurut Sluiter (2026), dakwaan konspirasi narkoterorisme memberikan keuntungan prosedural bagi jaksa AS karena mereka hanya perlu menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan kejahatan daripada bukti transaksi narkoba tertentu. Standar bukti ini jauh lebih mudah dipenuhi dan lebih fleksibel ketika digunakan sebagai alat geopolitik.

Seluruh proses sekuritisasi menunjukkan pola yang sejalan dengan analisis Neo-Gramscian yaitu hegemoni dipertahankan tidak hanya oleh kekuatan material tetapi juga oleh kemampuan untuk membedakan siapa yang 'normal' dan 'berbahaya' dalam sistem

internasional (Cox, 1981). Menolak rekomendasi IMF, menasionalisasi minyak, dan membangun jaringan kontra-hegemoni dengan Tiongkok, Rusia, dan Kuba, Venezuela yang anti-neoliberal secara bertahap digambarkan sebagai entitas yang lebih 'berbahaya' sampai intervensi militer langsung dapat dilihat oleh komunitas internasional sebagai tindakan yang wajar, bahkan perlu.

Implikasi Proses Sekuritisasi terhadap Tekanan Internasional dan Kondisi Venezuela

Dampak dari proses sekuritisasi AS terhadap keadaan ekonomi dan kemanusiaan Venezuela adalah konsekuensi yang paling nyata. Alat utama sekuritisasi, yaitu sanksi ekonomi, terbukti tidak efektif dalam dua hal. Di satu sisi, tujuan politik dari sanksi tersebut untuk memaksa Maduro mengundurkan diri atau menerapkan perubahan demokratis tidak tercapai. Namun, sanksi itu sangat memperburuk standar hidup warga Venezuela, yang sudah menghadapi kesulitan akibat pengelolaan ekonomi domestik yang tidak memadai. Menurut penelitian Weisbrot & Sachs (2019), sanksi AS membuatnya hampir mustahil untuk memulihkan ekonomi Venezuela, membuat penduduk mengonsumsi lebih sedikit kalori, dan meningkatkan angka penyakit dan kematian yang bisa dihindari. Salah satu keberatan paling dasar terhadap penggunaan sekuritisasi ekonomi oleh negara kaya terhadap negara berkembang adalah paradoks bahwa alat sekuritisasi ini sebenarnya membuat orang yang dimaksud untuk diselamatkan menderita lebih banyak daripada rezim yang menjadi sasaran.

Menurut Flores Flores (2025), sanksi AS terhadap Venezuela sebenarnya memiliki dua fungsi, pertama, berfungsi sebagai alat koersif untuk mendisiplinkan pemerintah Maduro. Kedua, mereka memberi Maduro narasi pembenaran yang kuat untuk menggambarkan dirinya sebagai korban imperialis, yang meningkatkan legitimasinya di antara pendukung Bolivarian yang setia. Dengan kata lain, karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh sanksi justru memperkuat kontrol negara atas distribusi sumber daya, mekanisme klientelisme yang disebut Salmerón & Salmerón (2019) sebagai "Leviathan Venezuela baru", sistem kontrol sosial paling maju secara teknologi di seluruh Amerika Latin, proses sekuritisasi AS secara tidak langsung memperpanjang umur rezim yang ingin digulingkannya.

Pada level kawasan, sekuritisasi Venezuela justru memperdalam polarisasi geopolitik Amerika Latin. Operasi militer Januari 2026 ditolak keras oleh Brasil, Meksiko, dan mayoritas negara Amerika Latin dan Karibia, sementara negara-negara NATO cenderung diam atau mendukung (Brookings Institution, 2026), hal ini memperlihatkan bahwa AS gagal membangun konsensus regional.

Presiden yang dibentuk oleh proses sekuritisasi Venezuela bagi sistem hukum dunia adalah dampak yang paling signifikan. Dua prinsip hukum internasional yang sama

pentingnya, prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi di satu sisi, dan prinsip pertanggungjawaban atas kejahatan internasional di sisi lain yang sebenarnya bertentangan setelah Maduro ditangkap oleh pasukan militer AS di Caracas. Maduro adalah kepala negara yang berdaulat yang ditangkap di negaranya sendiri. Menurut analisis Ahmed (2026), operasi ini adalah contoh paling ekstrim dari apa yang dia sebut sebagai 'selective enforcement of international law,' di mana norma hukum internasional diterapkan secara selektif berdasarkan kepentingan strategis negara yang menegakkannya dan digunakan untuk tujuan geopolitik.

Ketegangan ini terlihat jelas dalam respons Dewan Keamanan PBB. Denmark, sekutu keamanan Amerika Serikat, menyatakan dalam pertemuan darurat pada 5 Januari 2026 bahwa "tidak ada negara yang berhak mempengaruhi hasil politik di Venezuela melalui penggunaan ancaman atau kekuatan yang tidak sesuai dengan hukum internasional." Rusia dan China mengecam operasi tersebut sebagai "tindakan agresor hegemonik yang secara serius melanggar hukum internasional," sementara Prancis menyebutnya bertentangan dengan cita-cita penyelesaian sengketa secara damai (Al Jazeera, 2026). Selain berdampak pada Venezuela, debat ini menunjukkan bagaimana proses sekuritisasi yang berujung pada intervensi militer langsung mendorong batas-batas kerangka hukum internasional yang telah menjadi dasar tatanan dunia sejak Perang Dunia II. Kasus Venezuela menjadi peringatan serius bagi negara-negara berkembang lain yang memiliki sumber daya alam strategis dan kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan kekuatan besar tentang bagaimana proses sekuritisasi bisa digunakan sebagai alasan untuk intervensi yang melanggar standar kedaulatan yang sudah lama ada.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa politik anti-neoliberalisme Maduro yang mencakup pertahanan nasionalisasi PDVSA, penolakan IMF dan World Bank, kemitraan kontra-hegemoni bersama Rusia, Tiongkok, Iran, dan Kuba, serta kelanjutan ALBA dan PetroCaribe merepresentasikan upaya sistematis untuk menantang tatanan neoliberal global dalam kerangka Neo-Gramscian. Penolakan ideologis ini lalu memicu proses sekuritisasi AS, yang berjalan melalui tiga tahap eskalasi: pertama, hal itu diformalisasi sebagai ancaman terhadap demokrasi lewat Executive Order Obama pada 2015. Kedua, diframing sebagai ancaman terhadap keamanan regional lewat serangkaian sanksi Trump dan pemanfaatan OAS (2017–2019). Ketiga, dibangun sebagai narasi negara narkoba, dimulai dengan tuduhan Departemen Kehakiman AS pada 2020 dan berakhir dengan penangkapan militer Maduro pada Januari

2026. Setiap langkah sekuritisasi meletakkan dasar bagi legitimasi eskalasi berikutnya sekaligus membenarkan tindakan pada tahap tersebut.

Meski begitu, tiga konsekuensi dari proses sekuritisasi ini benar-benar merugikan. Alih-alih memberikan tekanan pada Maduro, sanksi ekonomi justru memperburuk situasi kemanusiaan dan menguatkan legitimasi politik rezim melalui klientelisme berbasis sumber daya. Alih-alih mendorong persatuan regional, sekuritisasi malah memperburuk perpecahan geopolitik di seluruh Amerika Latin. Penangkapan militer terhadap Maduro menetapkan preseden mengkhawatirkan untuk pengurangan aturan kedaulatan negara di tingkat norma internasional melalui penggunaan kerangka kriminal transnasional. Jadi, kasus Venezuela dari 2014 hingga 2026 menjadi contoh jelas bagi negara-negara berkembang tentang bagaimana oposisi terhadap hegemoni bisa secara bertahap dibingkai sebagai ancaman dan digunakan untuk mendukung tindakan yang melanggar norma internasional yang sebelumnya tak tersentuh.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, M. (2026). The politics of kidnapping: U.S. intervention and the detention of Venezuela's president Nicolás Maduro—Implications for international law and state sovereignty. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6036036>
- Berg, R. C. (2025). Parsing fact and fiction in the Maduro regime's narrative of economic recovery. *Center for Strategic and International Studies*. <https://www.csis.org/analysis/parsing-fact-and-fiction-maduro-regimes-narrative-economic-recovery>
- Budisatria, T., Hasibuan, B. H., & Dwiputra, R. H. (2022). Hiperinflasi Venezuela: Dampaknya terhadap posisi strategis Amerika Serikat–Venezuela. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 27(1), 63–80. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v27i1.2897>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781685853808>
- Corrales, J. (2020). Authoritarian survival: Why Maduro hasn't fallen. *Journal of Democracy*, 31(3), 39–53. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0044>
- Cox, R. W. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>
- Flores Flores, D. (2025). Venezuela y la geopolítica de la democratización: Efectos geoeconómicos y sociopolíticos de las sanciones estadounidenses en el gobierno de Nicolás Maduro (2015–2019). *Inter Naciones*. <https://doi.org/10.32870/in.vi28.7288>
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024: Venezuela*. <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-world/2024>
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001>

- International Monetary Fund. (2025). *World economic outlook database, October 2025*. <https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN>
- Ivon Christiana Kadang, Yuniarti, & Wirawan, R. (2022). Keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis Venezuela pada masa pemerintahan Nicolás Maduro. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 231–244.
- Kunkunrat, K., Priangani, A., & Monica, A. A. (2021). Dinamika politik dan pemerintahan Venezuela di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 4(2), 111–117. <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.4335>
- Loppies, N. R. W., Fathun, L. M., & Tarigan, D. H. (2020). Analisis kebijakan ALBA & PetroCaribe Nicolás Maduro Moros untuk menghadapi dominasi politik neoliberalisme Amerika Serikat di Venezuela pada 2015–2017. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.43>
- Maulidya, A. D. (2022). Ancaman perdamaian di Venezuela akibat kemerosotan demokrasi pada masa pemerintahan Nicolás Maduro. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(2), 108–127. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i2.4606.108-127>
- Oner, S. (2021). Nicolás Maduro: ECPS leader profile series, No. 5. *European Center for Populism Studies*.
- OPEC. (2022). *Annual statistical bulletin 2022*. Organization of the Petroleum Exporting Countries. https://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
- Salmerón, M., & Salmerón, C. (2019). Venezuela: Del “socialismo del siglo XXI” al colapso del Estado. *CIDOB Notes Internacionais*, 211.
- Sluiter, G. (2026). The abduction and criminal prosecution of Maduro: A few observations from an international and criminal law perspective. *Hague Journal on the Rule of Law*. <https://doi.org/10.1007/s40803-026-00268-9>
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- UNHCR. (2025). *Venezuela situation*. <https://www.unhcr.org/emergencies/venezuela-situation>
- U.S. Department of Justice. (2020). Attorney General William P. Barr announces narco-terrorism charges against Venezuelan President Nicolás Maduro Moros. <https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barr-announces-narco-terrorism-charges-against-venezuelan>
- Vanegas, J. M. (2026). The prosecution of Nicolás Maduro. *NSU Undergraduate Law Journal*.
- Weisbrot, M., & Sachs, J. (2019). Economic sanctions as collective punishment: The case of Venezuela. *Center for Economic and Policy Research*. <https://cepr.net/publications/economic-sanctions-as-collective-punishment-the-case-of-venezuela/>
- Al Jazeera. (2026, January 6). UN Security Council holds emergency session on Venezuela after Maduro's detention. <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/6/us-critics-and-allies-condemn-maduros-abduction-at-un-security-council>
- Anderson, S. R., et al. (2026, January 7). The global implications of the US military operation in Venezuela. *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/articles/the-global-implications-of-the-us-military-operation-in-venezuela/>